

BAB III

STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP KOREA UTARA DI MASA PEMERINTAHAN PARK GEUN HYE

Korea Selatan telah melakukan berbagai kebijakan di pemerintahan sebelumnya yang dibuat dengan fokus nya adalah Korea Utara. Namun, kebijakan - kebijakan di pemerintahan sebelumnya belum dapat menyelesaikan krisis yang terjadi di semenanjung Korea. Korea Utara masih memberikan respon yang negatif terhadap usaha serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Korea Selatan sebelumnya. Korea Utara juga masih mengembangkan nuklirnya, melakukan serangan provokasi dan membangun hubungan yang tidak baik dengan Korea Selatan.

Di bulan Februari 2013, telah terjadi pergantian pemerintahan di Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, Korea Selatan di pimpin oleh presiden wanita. Presiden Park Geun Hye yang mewakili partai Saenuri berhasil mengalahkan saingannya Moon Jae-in dari Partai Demokrat Bersatu di pemilihan Presiden pada 19 Desember 2012.⁵⁷ Presiden Park Geun Hye akhirnya menggantikan Lee Myung Bak dari posisi kursi kepresidenannya. Presiden Park diharapkan dapat menyelesaikan krisis di semenanjung Korea yang tak kunjung usai secara damai namun tegas.

⁵⁷ KOMPAS, *Park Geun Hye Presiden Korsel*, (Diakses pada 9 Oktober 2014); 20 desember 2012, dapat di akses di <http://lipsus.kompas.com/samsungativ/read>

Di awal pemerintahan Park Geun Hye, Park sudah menghadapi berbagai ancaman dari Korea Utara. Contohnya saja, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ke-3 di bulan februari 2013.⁵⁸ Sebagai presiden Korea Selatan, Park tidak hanya ingin membangun hubungan antar-Korea tanpa adanya kemajuan dalam denuklirisasi. Pemerintahan Park Geun Hye tetap ingin mengajak Korea Utara untuk menghentikan pengembangan nuklir nya. Nuklir Korea Utara selalu mengancam keamanan dan ketahanan wilayah Korea Selatan maupun negara tetangga lainnya. Park Geun Hye pun harus mengeluarkan strategi kebijakan luar negeri dengan fokus Korea Utara untuk mengatasi krisis semenanjung Korea. Park Geun Hye memilih untuk melakukan strategi yang merupakan perpaduan dari presiden - presiden sebelumnya. Presiden Park akan mengambil strategi diplomasi dengan menjalankan suatu kebijakan yang bernama *Trust Building Process*, dan tetap akan meningkatkan aliansi militer dengan sekutunya Amerika Serikat untuk menjaga pertahanan wilayah Korea Selatan dari provokasi Korea Utara

A. Strategi Diplomasi Korea Selatan

Untuk menghadapi Korea Utara, Pemerintahan Korea Selatan selalu mencoba menggunakan strategi diplomasi dalam menjalin hubungan dengan Korea Utara. Dengan teknik- teknik diplomasi seperti negosiasi di harapkan dapat menyelesaikan krisis yang terjadi di semenanjung Korea. Diplomasi juga digunakan untuk

⁵⁸ S. J. Kim, G. J. Kim, & J. E. Kim (2013). *Building Trust in East Asia*. (diakses pada tanggal

melaksanakan kebijakan luar negeri Korea Selatan demi tercapainya kepentingan nasional Korea Selatan. Diplomasi digunakan dan diterapkan dalam berbagai kebijakan yang berbeda di setiap pemerintahan di Korea Selatan. Di masa pemerintahan Park Geun Hye, Dialog dan negosiasi di terapkan dalam bidang politik, ekonomi dan isu kemanusiaan. Korea Selatan mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat membuat kedua Korea secara berangsur - angsur (proses) membangun saling kepercayaan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea dan menyatukan semenanjung Korea dengan melanjutkan dialog yang ada, berkomitmen pada janji dan berusaha untuk saling melakukan pertukaran dan kerjasama. Kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara itu bernama *trust-building process*.

1. Kebijakan Luar Negeri *Trust-building process*

Trust Building Process diperkenalkan pertama kali di tahun 2011 oleh Presiden Park Geun Hye dalam artikel yang berjudul *A New Kind of Korea: Building trust between Seoul dan Pyongyang* yang ditulis untuk *Foreign Affairs*. Dari sebuah artikel pada akhirnya *trust-building process* di tuangkan menjadi sebuah kebijakan luar negeri baru Korea Selatan terhadap Korea Utara. Dalam artikel itu, Presiden Park mengungkapkan bahwa Presiden Park sangat menginginkan perdamaian di semenanjung Korea. Park Geun Hye merupakan anak Park Chung Hee yang merupakan Presiden Korea Selatan yang ke-3. Park sudah mengalami masa - masa sulit akibat konflik yang selama ini terjadi di semenanjung Korea. Presiden

Korea Selatan mengetahui bahwa kepercayaan di antara kedua Korea sangat rendah. Korea Selatan pun harus membangun kembali kepercayaan itu melalui kebijakan *trust-building process*. Hal ini diperlukan untuk mengubah semenanjung Korea dari zona konflik menjadi zona kepercayaan.

Walaupun kebijakan *trust-building process* dan kebijakan Korea Selatan di masa pemerintahan sebelumnya terlihat sama namun tetap memiliki perbedaan di dalamnya. Kebijakan sebelumnya berpusat pada dialog dan pertukaran antar-Korea yang telah menguatkan kerjasama antar-Korea. Tetapi di saat bersamaan bersepakat di beberapa prinsip. Di sisi lain, kebijakan yang berdasarakan pendekatan prinsip menghasilkan sesuatu yang lebih konsistensi, tetapi kurang mudah di sesuaikan. Sedangkan kebijakan *Trust-building process* berasal dari sebuah pendekatan baru terhadap Korea Utara, yang mempunyai konsep sejajar/seimbang dan secara berhati-hati mengkoordinasi kunci dasar dari dua kebijakan dari kedua negara, karena itu kebijakan ini lebih mudah disesuaikan (*flexible*) atau tanggapan pasti yang di anggap di butuhkan bisa di kejar. Strategi Korea Selatan dalam kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara pendekatan *hard* maupun *soft*, tekanan dan dialog, keamanan dan kerjasama, dan hubungan antar-Korea dan kerjasama internasional.⁶⁰

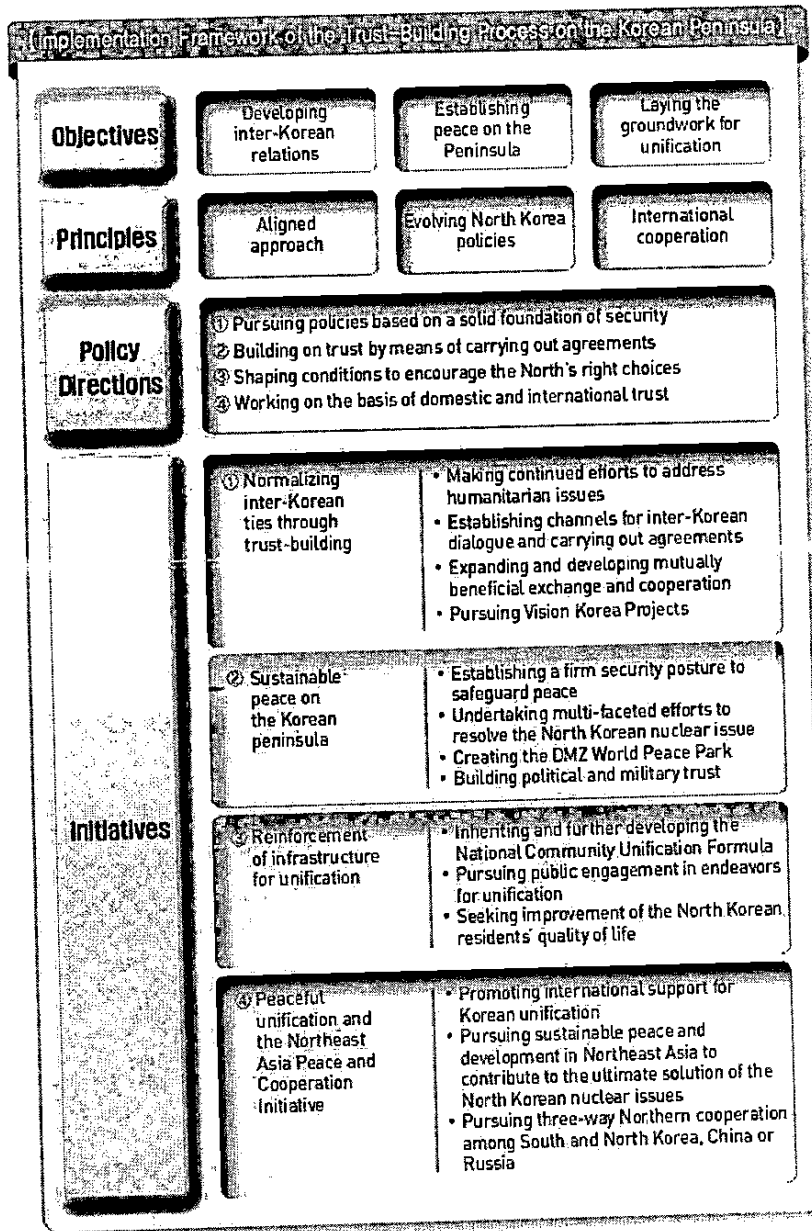
Pada tanggal 25 Februari 2013 yang merupakan hari pelantikan Park Geun Hye sebagai presiden Korea Selatan, Presiden Park menyampaikan pidato sebagai berikut:

“Melalui kebijakan *trust-building process* di semenanjung Korea, saya berniat untuk membuat dasar bagi era unifikasi yang harmonis di mana semua warga Korea dapat menjalani hidup makmur dan lebih bebas dan di mana impian mereka bisa menjadi kenyataan. Aku akan bergerak maju langkah demi langkah untuk membangun kepercayaan antara Selatan dan Utara. Kepercayaan dapat dibangun melalui dialog dan menghormati janji-janji yang telah dibuat. Ini adalah harapan saya bahwa Korea Utara akan mematuhi norma-norma internasional dan membuat pilihan yang tepat sehingga proses membangun kepercayaan di semenanjung Korea bisa bergerak maju”⁶¹

Dalam menjalankan Kebijakan luar negeri Korea Selatan yang bernama *trust-building process* ini tentu mempunyai pelaksanaan dari kerangka yang terdiri dari tujuan, prinsip, arah dan inisiatif dari pemerintah Korea Selatan. Pemerintahan Park Geun Hye meyakini apabila hal - hal ini dapat dicapai maka perdamaian, unifikasi dan denuklirisasi akan terjadi di semenanjung Korea.

Gambar 3.1

Implementasi kerangka *Trust-building process on the Korean Peninsula*



Sumber: 2014 White paper on Korean Unification

a. Tujuan dari kebijakan *trust-building process*:

- 1) Pemerintah Korea Selatan ingin lebih mengembangkan hubungan antar-Korea. Pemerintahan dibawah kepemimpinan Park Geun Hye akan berusaha untuk membuka babak baru dalam hubungan antar-Korea berdasarkan akal sehat dan sesuai dengan norma - norma internasional. Dan juga memperluas dasar kepentingan bersama , pertukaran dan kerjasama antar-Korea, dalam mengejar membangun masyarakat ekonomi dan sosial budaya di kedua Korea
- 2) Pemerintah Korea Selatan berusaha untuk membangun perdamaian di semenanjung Korea. Pemerintah Korea Selatan akan mencari kecocokan antara kerjasama internasional dan kerjasama antar-Korea untuk mencapai denuklirisasi di semenanjung Korea. Korea Selatan akan mempromosikan kepercayaan antar-Korea di bidang politik dan militer, yang bertujuan untuk mengamankan perdamaian abadi di wilayah semenanjung Korea.
- 3) Pemerintah Park Geun Hye akan membuat fondasi untuk unifikasi Korea. Dalam lingkup domestik, pemerintah ROK akan membangun kemampuan untuk membuat prakarsa dan membuat persiapan yang cukup besar agar semenanjung Korea dapat bersatu. Di sisi eksternal, ROK akan berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat internasional fakta bahwa penyatuan Korea dapat diwujudkan melalui kerjasama seluruh dunia, dan bahwa ini akan menjadi *win-win*

juga bagi masyarakat global. Hal ini dilakukan dengan adanya edukasi mengenai unifikasi Korea kepada masyarakat Korea umum maupun internasional.

b. Prinsip dasar kebijakan *trust-building process*:

1. Pemerintah Korea Selatan akan melakukan pendekatan selaras. Pemerintah ROK akan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional di satu sisi dan pertukaran serta kerjasama antar-Korea di sisi lain, serta kerjasama internasional. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Korea Selatan akan berusaha untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih baik atau mempunyai tekad lebih dalam menanggapi penyelesaian krisis di semenanjung Korea.
2. Pemerintah ROK akan mencoba untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kebijakan Korea Utara ke arah yang lebih baik. Korea Selatan berusaha untuk mengarahkan Utara ke jalan pilihan yang tepat dan mewujudkan kemajuan bersama untuk kedua Korea. Selain itu, dengan mencerminkan perkembangan yang sedang berlangsung dalam kebijakan Korea Utara, Korea Selatan bertujuan untuk secara proaktif mengelola situasi di semenanjung Korea.
3. Pemerintah ROK akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengatasi krisis keamanan di semenanjung Korea, sementara mencari siklus yang baik untuk menemukan solusi yang baik untuk menanggapi isu-isu semenanjung Korea dan kerjasama yang lebih besar bagi perdamaian di kawasan Asia Timur

c. Arah Kebijakan

- 1) Pemerintah Korea Selatan akan mengejar kebijakan berdasarkan fondasi keamanan yang kuat. Pemerintah ROK akan menghalangi provokasi Korea Utara didasarkan pada pertahanan keamanan yang kuat dan tegas dalam menanggapi setiap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Pada saat yang sama, Korea Selatan akan tetap memberikan kesempatan dialog, pertukaran, kerjasama dan membuat upaya terus menerus untuk mengembangkan hubungan antar-Korea.
- 2) Korea Selatan akan membangun kepercayaan melalui melaksanakan perjanjian. Pemerintah ROK akan menghormati dan mematuhi perjanjian tidak hanya antar-Korea tetapi juga dengan masyarakat internasional untuk membangun kepercayaan.
- 3) Korea Selatan akan membentuk kondisi dimana Korea Utara memilih pilihan yang tepat. Pemerintah ROK berusaha untuk mendorong Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dan mematuhi norma-norma dan kewajiban internasional. Pemerintah ROK akan melakukan upaya-upaya untuk membentuk lingkungan untuk perubahan di Korea Utara melalui berbasis kepercayaan antar-Korea dialog, pertukaran dan kerja sama.
- 4) Korea Selatan akan melaksanakan kebijakan luar negeri nya atas dasar

d. Prakarsa

Normalisasi hubungan antar-Korea melalui membangun kepercayaan.

1. Pemerintah Republik Korea akan melakukan upaya terus - menerus untuk mengatasi masalah kemanusiaan.

Terlepas dari situasi politik di semenanjung Korea, pemerintah Korea Selatan akan tetap berkomitmen untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada penduduk rentan di Korea Utara seperti bayi dan ibu hamil dan juga akan menawarkan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan lainnya, termasuk keluarga terpisah, tawanan perang, dan korban penculikan di Korea Utara

2. Melalui kebijakan *Trust-building*, Pemerintah Korea Selatan akan membangun saluran dialog dan komunikasi antar-Korea dan membawanya dalam kesepakatan.

Pemerintah ROK akan melakukan upaya untuk melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Korea Utara dan mendirikan saluran permanen untuk dialog antar-Korea dengan standar internasional. Sementara Korea berdiri dengan semangat "saling menghormati dan perdamaian," Pemerintahan Park Geun Hye akan membawa perjanjian antar Korea dalam

meningkatkan manfaat publik dan situasi keamanan

3. Melalui kebijakan ini, pemerintahan Park Geun Hye akan mempeluas dan mengembangkan pertukaran dan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua Korea.

Dalam hal ini pemerintah Korea berinisiasi untuk melakukan beberapa hal yakni:

Pertama, pemerintah ROK akan berusaha bekerja menuju normalisasi kompleks industri Gaeseong serta perkembangannya dalam hubungan internasional,

Kedua, Korea Selatan akan melakukan berbagai macam pertukaran sosial dan budaya di antara dua Korea termasuk hubungan Korea dalam kegiatan akademik dan agama,

Ketiga, pemerintahan Park juga bermaksud menjalankan proyek kerjasama dalam pengembangan bersama sumber daya bawah tanah di Korea Utara yang dapat menghasilkan hasil *win win solution* dan juga membangun komunikasi lingkungan Selatan - Utara melalui inisiatif Green Détente yang melibatkan kerjasama dalam isu - isu pertanian dan lingkungan.

Keempat, Korea Selatan juga akan bekerja menuju dimulainya kembali kerjasama pariwisata Mt. Geumgang dan membahas juga mengenai isu-isu keselamatan pribadi dan mekanisme lainnya

4. Pemerintahan Korea Selatan akan mengejar Visi dari proyek Korea sejalan dengan kemajuan dalam membangun kepercayaan dan usaha denuklirisasi

Sebagaimana pemerintah Korea Selatan membangun kepercayaan di semenanjung Korea dan melihat perkembangan isu nuklir Korea Utara, pemerintah ROK akan melakukan upaya untuk memperluas infrastruktur Korea Utara termasuk, listrik, transportasi dan telekomunikasi, dalam rangka meningkatkan swasembada Utara, Pemerintah Korea Selatan juga akan mendukung keanggotaan Utara untuk lembaga keuangan internasional dan mencari peluang investasi asing di zona ekonomi khusus di Utara. Serta, akan berusaha untuk membangun kantor untuk pertukaran dan kerjasama antar-Korea di Seoul dan Pyongyang

Perdamaian di semenanjung Korea

1. Pemerintah Korea Selatan akan membangun postur keamanan yang kuat untuk usaha perlindungan perdamaian.

Pemerintah Korea Selatan akan menghalangi provokasi Korea Utara melalui pencegahan yang kuat dan akan lebih meningkatkan kemampuan pertahanan yang komprehensif.

2. Pemerintah Korea Selatan akan melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara

Pemerintah ROK akan melakukan keseimbangan antara kerja sama antar-Korea di satu sisi dan bekerja dengan masyarakat internasional di sisi lain, sementara menggunakan metode persuasi dan tekanan untuk menghalangi Utara dari mengembangkan senjata nuklir. Untuk kemajuan dalam pencapaian denuklirisasi, akan diadakan dialog antar-Korea dengan mempertimbangkan langkah - langkah yang sepadan dalam konteks politik - ekonomi dan diplomatik. Penyelesaian masalah nuklir juga dapat dilakukan melalui *six party talks* dan diskusi strategis tiga arah antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan China.

3. Membangun Taman Perdamaian Dunia di DMZ

Pemerintah ROK akan melakukan upaya bersama dengan Perserikatan Bangsa - Bangsa dan negara terkait untuk membuat taman perdamaian dunia di daerah demilitarisasi (DMZ). DMZ merupakan daerah yang merupakan daerah yang mungkin cukup menakutkan karena merupakan perbatasan diantara dua Korea. Namun, pada pemerintahan Park Geun Hye di dalam DMZ ini akan di tempatkan sebuah taman yang akan menunjukkan model perdamaian dan kerjasama antara kedua Korea dan komunitas internasional.

Penguatan Infastruktur untuk Unifikasi

1. Pemerintah ROK akan mewarisi dan mengembangkan Formula Unifikasi Komunitas Nasional

Seperti pemerintahan Sebelumnya, Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park akan mengembangkan formula unifikasi masyarakat Korea. Pemerintah ROK akan menjadi tuan rumah seminar akademik, pertemuan publik dan sarana komunikasi lainnya untuk mengumpulkan berbagai tanggapan, dalam rangka membangun mufakat nasional pada arah perkembangan Formula Unifikasi Komunitas Nasional.

Hal itu dapat dilakukan mulai dari upaya penyatuan kecil (misalnya masyarakat ekonomi), yang pada akhirnya akan menuju penyatuan yang lebih besar unifikasi (misalnya integrasi politik). Untuk tujuan ini, Korea Selatan akan mempromosikan penelitian tentang unifikasi Korea, studi Korea Utara baik di dalam maupun di luar negeri, dan membangun kerangka kerjasama antar lembaga penelitian.

2. Mencari keterlibatan masyarakat dalam upaya unifikasi Korea

Dalam mengejar kebijakan unifikasi, pemerintah ROK menempatkan pembangunan mufakat masyarakat Korea sebagai prioritas utama, sekaligus memperkuat kerjasama bipartisan (yang didukung oleh dua partai). Melalui kebijakan ini akan memperkuat pendidikan untuk unifikasi sehingga

mengumpulkan komitmen dari Korea Selatan dan meningkatkan kemampuan Korea untuk semenanjung Korea bersatu. Dan Korea Selatan juga akan meningkatkan infrastruktur dan sistem untuk melindungi dan mendukung pengungsi Korea Utara yang menetap di Korea Selatan.

3. Membantu meningkatkan kualitas hidup bagi warga Korea Utara.

Pemerintah ROK akan melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan domestik dan internasional yang menguntungkan bagi perbaikan situasi HAM di Korea Utara, termasuk diberlakukannya Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Pemerintah ROK juga akan memperluas dan mengembangkan hubungan kerjasama Korea Selatan dengan kelompok-kelompok sipil dan masyarakat internasional. Selama perkembangan hubungan antar-Korea, Korea Selatan akan mencari banyak upaya untuk bekerja sama dengan Korea Utara dalam rangka mengembangkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Unifikasi Damai dan Prakarsa Perdamaian dan Kerjasama di Asia Timur

Laut

1. Korea Selatan akan secara aktif mempromosikan unifikasi Korea untuk

Selama setahun masa pemerintahan Park Geun Hye, Kebijakan *trust-building* tampaknya diterima dengan baik karena merupakan kebijakan yang realistis dan seimbang yang memiliki potensi besar untuk secara efektif mengatasi kesulitan yang dihadapi Korea Selatan dan juga untuk menjadikan semenanjung Korea baru. Para pemimpin kunci global dan ahli, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, telah memberikan dukungan mereka yang antusias kepada niat baik dari Korea Selatan ini.⁶³

Sudah banyak pencapaian yang didapat pemerintahan Park Geun Hye dalam satu tahun (Februari 2013 - Februari 2014). Pencapaian yang telah didapatkan selama satu tahun pemerintahan Park Geun Hye yakni:

1. Di masa pemerintahan Lee Myung Bak, Korea Utara dan Selatan hanya menghasilkan 8 pertemuan dan 1 kesepakatan di tahun 2010 dan 1 pertemuan di tahun 2011. Sedangkan di masa pemerintahan Park Geun Hye selama setahun telah menghasilkan total 27 pertemuan dengan 10 hasil kesepakatan yang telah di tanda tangani. Kesepakatan yang diperoleh di antaranya 7 kesepakatan mengenai normalisasi kompleks industri Gaeseong, 2 kesepakatan pertemuan tingkat kerja palang merah kedua Korea dan satu pernyataan bersama yang diperoleh dari pertemuan tingkat tinggi.⁶⁴

⁶³ Yun Byung-se, [Contribution] *President Park Geun-hye's Trustpolitik*, (diakses pada 7 September 2014); 30 September 2013, dapat diakses di <http://www.korea.net/NewsFocus/Policies/>

⁶⁴ Ministry of Unification, *Major Achievement of the trust-building process on the Korean Peninsula*
Dikompilasi dan diterjemahkan oleh Park Geun Hye Administration 2012.2.25 - 2014.2.25

Tabel 3.1

Status report on inter-Korean meetings and agreements during

the Park Geun Hye administration

Number of inter-Korean meetings held: a total a 27

As of February 20, 2014

No.	Note	Date	Meeting title	Venue
1	Government	June. 9, 2013	Working-level meeting	Peace House, Panmunjeom
2		Feb. 12-14, 2014	High-level meeting	Peace House, Panmunjeom
3	Gaeseong Industrial Complex	July. 6, 2013	1st Government working-level meeting concerning Gaeseong Industrial Complex	Tong-il Gak, Panmunjeom
4		July. 10, 2013	2nd Government working-level meeting concerning Gaeseong Industrial Complex	Comprehensive Support Center GIC
5		July. 15, 2013	3rd Government working-level meeting concerning Gaeseong Industrial Complex	Comprehensive Support Center, GIC
6		July. 17, 2013	4th Government working-level meeting concerning Gaeseong Industrial Complex	Comprehensive Support Center, GIC
7		July. 22, 2013	5th Government working-level meeting	Comprehensive

		concerning Gaeseong Industrial Complex	Support Center, GIC
8	July. 25, 2013	6th Government working-level meeting concerning Gaeseong Industrial Complex	Comprehensive Support Center, GIC
9	Aug. 14, 2013	7th Government working-level meeting concerning Gaeseong Industrial Complex	Comprehensive Support Center, GIC
10	Sept. 2, 2013	1st meeting of Gaeseong Industrial Complex Joint Commission	Comprehensive Support Center, GIC
11	Sept. 4, 2013	1st meeting of investment protection subcommittee	Comprehensive Support Center, GIC
12	Sept. 4, 2013	1st meeting of international competitiveness subcommittee	Comprehensive Support Center, GIC
13	Sept. 5, 2013	1st meeting of subcommittee on communication, customs and passing	Comprehensive Support Center, GIC
14	Sept. 5, 2013	1st meeting of subcommittee on entrance and legal stay	Comprehensive Support Center, GIC
15	Sept. 10, 2013	2nd meeting of Gaeseong Industrial	Comprehensive

		Complex Joint Commision	GIC
16	Sept. 13, 2013	2nd meeting of subcommittee on communication, customs and passing	Comprehensive Support Center, GIC
17	Sept. 13, 2013	2nd meeting of subcommittee on entrance and legal stay	Comprehensive Support Center, GIC
18	Sept. 16, 2013	3rd meeting of Gaeseong Industrial Complex Joint Commision	Comprehensive Support Center, GIC
19	Sept. 26, 2013	3rd meeting of subcommittee on entrance and legal stay	Comprehensive Support Center, GIC
20	Nov. 13, 2013	2nd meeting of international competitiveness subcommitte	Comprehensive Support Center, GIC
21	Nov. 13, 2013	2nd meeting of investment protection subcommittee	Comprehensive Support Center, GIC
22	Nov. 14, 2013	4th meeting of subcommittee on entrance and legal stay	Comprehensive Support Center, GIC
23	Nov. 29, 2013	3rd meeting of subcommittee on communication, customs and passing	Comprehensive Support Center, GIC

24		Dec. 19, 2013	4th meeting of Gaeseong Industrial Complex Joint Commission	Comprehensive Support Center, GIC
25		Jan. 24, 2013	4th meeting of subcommittee on communication, customs and passing	Comprehensive Support Center, GIC
26	Red Cross	Aug. 23, 2013	Working-level meeting	Peace House, Panmunjeom
27		Feb. 5, 2014	Working-level meeting	Tong-il Gak, Panmunjeom

Tabel 3.2

Number of agreements signed: a total of 10

No.	Note	Date	Agreement title
1	Government	Feb. 12-14, 2014	High-level meeting joint communique
2	Gaeseong	July. 7, 2013	Working-level agreement on GIC
3		August. 14, 2013	Agreement on the normalization of the GIC
4		August. 28, 2013	Agreement on the formation and operation of a joint commission for the GIC
5		Sent. 11. 2013	Agreement on the formation and

			operation of a joint secretariat for the GIC
6		Sept. 11, 2013	Joint communique following the 2nd meeting of the joint joint commission of the GIC
7		Sept. 11, 2013	Auxiliary agreement on the implementation of the "Agreement on the formation and operation of a mediation committee for comercial trade between North and South Korea"
8		Oct. 23, 2013	Auxiliary agreement on the formation and operation of a joint secretariat for the GIC
9	Red Cross	August. 28, 2013	Agreement following working-level meetings between the Red Cross of North and South Korea
10		Feb. 5, 2014	Agreement following working-level meetings between the Red Cross of North and South Korea

2. Adanya kesepakatan mengenai normalisasi kompleks industri Gaeseong.

Proyek kompleks industri Gaeseong adalah proyek dua Korea untuk mengembangkan dan mengejar kerjasama ekonomi yang bertempat di dekat perbatasan kota Gaeseong, Hwanghaebukdo, Korea Utara. Setelah perundingan dan perjanjian antara pengusaha Hyundai dan Asan dari Korea Selatan dan Korea Utara. Pembangunan GIC ini Namun, proyek itu bermasalah ketika di masa pemerintahan Lee Myung Bak dan awal pemerintahan Park. Korea Utara menutup dan menarik secara sepihak 53.000 pekerja Korea Utara yang bekerja di Gaeseong dan mengusir pekerja Korea Selatan. Pemerintahan Park Geun Hye menganggap proyek kerjasama ini merupakan hal yang penting bagi kedua Korea. Oleh karena itu, pemerintahan Park Geun Hye berusaha mengajak Korea Utara melakukan pertemuan guna melakukan dialog dan negosiasi untuk normalisasi Gaeseong. Dan pada akhirnya normalisasi dapat terwujud, sehingga Gaeseong dapat beroperasi kembali.⁶⁵

3. Kesepakatan reuni Keluarga kedua Korea yang terpisah

Pemerintahan Park Geun Hye tidak henti - henti nya untuk mengusulkan adanya reuni keluarga terpisah. Reuni keluarga Korea terakhir kali dilakukan di tahun 2010. Di tahun 2013, Park mengusulkan hal yang sama namun di tolak oleh Korea Utara. Akhirnya setelah terjadi negosiasi yang cukup

⁶⁵ Antara News, *Korut dan Korsel sepakat buka kembali kawasan industri Gaeseong*, (di akses pada 9 Oktober 2014); 5 Agustus 2013 dapat di akses di <http://www.antaranews.com/berita/200610/>

panjang, pertemuan di sepakati dilaksanakan pada tanggal 20 - 25 Februari 2014.

Pertemuan di lakukan dalam dua sesi berlokasi di gunung Geumgang. Sesi

pertama, 82 warga Korea Selatan bertemu dengan 180 warga Korea Utara.

Sementara sesi kedua, 88 warga Korea Utara bertemu 372 warga Korea Selatan.⁶⁶

4. Keberlanjutan Pemberian bantuan kemanusiaan dan pertukaran sosial dan budaya

Pemberian bantuan kemanusiaan

Di masa pemerintahan Lee Myung Bak, Lee mengurangi pemberian bantuan kepada Korea Utara akibat rasa kecewa Lee terhadap sikap Korea Utara yang selalu melakukan penyerangan kepada Korea Selatan dan tetap mengembangkan nuklirnya. Di masa pemerintahan Park Geun Hye, beliau menerapkan strategi yang dapat disesuaikan dengan sikap Korea Utara namun untuk pemberian bantuan kemanusiaan wajib di lakukan. Total bantuan kemanusiaan yang di berikan Park Geun Hye di tahun 2013 adalah 20.3 milyar Won. Bantuan ini merupakan yang terbesar sejak dari tahun 2010.⁶⁷

⁶⁶ Fajar Nugraha, *60 tahun terpisah, Keluarga Korea Akhirnya bertemu*, (di akses pada 17 November 2014); 21 Februari 2014, dapat di akses <http://news.okezone.com/read/2014>

⁶⁷ Ministry of Unification, Republic of Korea, *Major Achievement of the Trust-Building Process on the*

Tabel 3.3

Pemberian Bantuan Kemanusiaan yang telah di kirim ke Korea Utara di tahun 2013

Asal Bantuan	Jumlah	Jumlah organisasi	Detail
Bantuan dari organisasi swasta	6.8 milyar Won	18	Pengobatan untuk anak dan bayi, berkaitan hal dengan makanan yang bergizi dan barang – barang
Bantuan dari organisasi internasional	13.5 milyar Won	2	- WHO (6.8 milyar Won): Pengobatan untuk anak-anak, bayi dan yang mengharapkan ibu - UNICEF (6.7 milyar Won): Vaksin dan nutrisi untuk anak dan bayi

Sumber: *Ministry of Unification Republic of Korea*

Di tahun 2013, telah terjadi 197 kasus pertukaran sosial dan budaya, 5 kunjungan Korea Utara dan 2 kunjungan Korea Selatan ke Korea Utara. Dalam

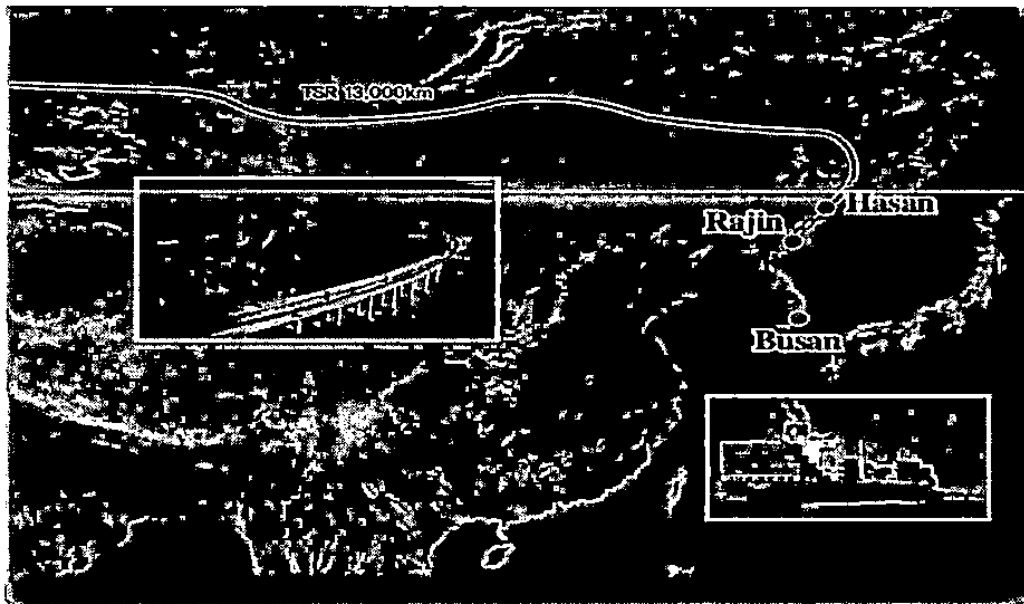
hidupnya ada 95 keluarga di bidang agama seperti misi bersama 10 kasus

dalam olahraga seperti dalam *East Asia Soccer Championship*, and *Asian Cup Weight Lifting competition*., 42 kasus dalam edukasi atau akademik, 15 kasus dalam budaya dan kesenian dan 36 kasus yang lainnya. Di tahun 2014, Atlet Korea Utara mendatangi Korea Selatan untuk mengikuti Asian Games Incheon.

5. *Rajin - Hasan Logistic project*

Gambar 3.2

Rajin - Hasan Logistic project



Logistical network linking Busan, Rajin, and Hasan

Sumber: 2014 *White paper on Korean Unification*

Proyek Rajin - Hasan merupakan hasil dari kerjasama antara Korea Selatan, Korea Utara dan Rusia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan jalan kereta api *Trans-Korean* (TKR) dan jalur kereta api *Trans-Siberian* (TSR). Proyek perawatan Rajin Hasan ini merupakan bagian untuk memperbaiki jalur kereta api antara Rajin di

Korea Utara dan Hassan yang berada di Rusia. Program Rajin-Hasan ini di mulai di tahun 2000 dan selesai Pada September 2013.

Untuk mewujudkan keinginan denuklirisasi dan perdamaian di semenanjung Korea di butuhkan hubungan diplomasi dan dukungan dari negara lain. Korea Selatan bekerjasama dengan China di bidang ekonomi. Korea Selatan ingin mendesak China untuk mengambil tindakan untuk Korea Utara dengan adanya kerjasama ekonomi. Korea Selatan ingin China membantu dalam hal reunifikasi Korea. Hubungan China dan Korea Utara memang tidak dapat dipisahkan. Kedua negara penganut komunis itu telah menjalin hubungan begitu lama. Walaupun sering ada debat di antara keduanya, namun hingga sekarang China dan Korea Utara tetap melakukan kerjasama ekonomi. China pun diharapkan dapat aktif di komunitas internasional untuk mengatasi denuklirisasi Korea Utara.⁶⁸

B. Strategi Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat

Dalam pemerintahan Park Geun Hye, Presiden Park mempunyai strategi untuk membuat pertahanan yang aktif dan perbaikan militer untuk Korea Selatan. Korea Utara dan program nuklir nya merupakan isu keamanan yang paling kritis di

semenanjung maupun di kawasan Asia Timur. Pilihan Korea Utara untuk melakukan diplomasi nukir merupakan strategi untuk mempertahankan rezim yang secara bersamaan menjadi masalah keamanan internasional bagi negara-negara Amerika Serikat, China, dan Jepang.⁶⁹ Oleh karena itu, Untuk menjaga perdamaian dan keamanan wilayah Korea Selatan, selain melakukan hubungan diplomasi baik dengan Korea Utara dan negara sekitarnya, Park memutuskan bahwa aliansi Korea Selatan dan Amerika harus tetap dilaksanakan dan diperkuat.⁷⁰ Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat sudah berlangsung selama 61 tahun. Aliansi keduanya bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, level Asia Timur dan global. Aliansi selama ini sudah berhasil mempertahankan perjanjian gencatan senjata, promosi mengenai demokrasi dan menjaga stabilitas di masyarakat Korea dan sekitarnya.⁷¹ Bagi Korea Selatan, aliansi berdiri sebagai salah satu sejarah yang terkuat dan kerjasama militer yang paling efektif. Washington juga mendukung kebijakan Presiden Park yakni membangun kepercayaan.

Dengan melakukan aliansi dengan Amerika Serikat, Keamanan nasional Korea Selatan berada dalam jaminan dibawah Amerika yang dikenal dengan payung nuklir. Sejak berada di bawah pemerintahan Park Geun Hye, yang mulai menjabat di

⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 220

⁷⁰ Asia Pacific Defense Forum, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menuai pujian tinggi setelah 100 hari, *Op.Cit.*,

⁷¹ STATEMENT OF GENERAL CURTIS M. SCAPARROTI COMMANDER, UNITED NATIONS COMMAND; COMMANDER, UNITED STATES-REPUBLIC OF KOREA COMBINED FORCES COMMAND; AND COMMANDER, UNITED STATES FORCES KOREA BEFORE THE SENATE ARMED SERVICES COMMITTEE, 25 March 2014, hal 1

bulan Februari 2013, aliansi antara ROK dan US mulai fokus kepada kebijakan koordinasi antara Washington dan Seoul sehubungan dengan Korea Utara.⁷² Pada 22 Maret 2013, Korea Selatan dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerjasama militer baru untuk menghadapi serangan korea utara dimasa mendatang. Melalui perjanjian ini Korea Selatan dapat dengan mudah dan cepat untuk meminta bantuan Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman negara tetangganya misalnya penyerangan di kawasan pulau terpencil di Korea Selatan.⁷³ Jumlah provokasi yang dilakukan korea utara yakni sebanyak 3000 kasus termasuk penyusupan mata-mata, penculikan, penembakan. Pada tahap awal, pihak Amerika Serikat menyampaikan sikap yang pasif untuk ikut terlibat guna merumuskan gagasan strategis militer Korea Selatan dalam rancangan Kerjasama militer baru anantara kedua negara. Karena, ada kekhawatiran atas kemungkinan besar terjadinya perang berskala penuh. Tetapi, mengingat ancaman Korea Utara baru-baru ini, termasuk peluncuran roket jarak jauh dan pelaksanaan uji-coba nuklir, Amerika Serikat dikabarkan siap menyetujui tuntutan pihak Korea Selatan.⁷⁴

Hubungan keduanya berlanjut semakin kuat dengan adanya penambahan pasukan tentara dari Amerika Serikat. Washington telah menempatkan sekitar 28.500

⁷² Timeline hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat dapat dilihat di lampiran halaman 95.

⁷³ Tempo News, *Korsel dan Amerika Teken Kerja Sama Militer Baru*, 25 Maret 2013, (di akses pada 9 Oktober 2014); dapat di akses di <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/25/>

⁷⁴ KBS world radio, *Isi perjanjian kerjasama militer baru antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menghadapi serangan Korea Utara dan efek perjanjian itu*, (di akses pada 9 Oktober 2014); 28 Maret 2013, dapat di akses di http://world.kbs.co.kr/indonesia/event/aberaa_sulgar/

di semenanjung Korea untuk menambah 650.000 kuatnya pasukan bersenjata milik Korea. Amerika Serikat juga memberikan komando di Korea Selatan. Hal ini terungkap sebuah visi dari USFK (United States Forces Korea) yang memainkan peranan keamanan melalui angkatan udara dan angkatan laut Amerika Serikat di Korea Selatan sedangkan sebagian besar pasukan bersenjata Korea Selatan mengambil bagian dalam pasukan angkatan darat (hampir 550.000 angkatan darat) dengan pasukan angkatan udara dan angkatan laut Korea Selatan yang hanya berkisar 65.000 personel militer.⁷⁵

Pada bulan April 2013, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui adanya perpanjangan 2 tahun untuk perjanjian kerjasama nuklir, yang dikenal dengan *123 agreement*, yang mana masa terakhir berlakunya adalah Maret 2014. Legislasi 2 tahun masa penambahan ini di tanda tangan oleh Presiden Obama pada 12 Februari 2014. Kementerian pertahanan juga telah mengkonfirmasi akan membeli 40 F-35A (Joint Strike Fighters) untuk menggantikan armada milik Korea Selatan obsolete F-4 dan F-5 di tahun 2018.⁷⁶

Korea Selatan dan Amerika Serikat juga melakukan latihan militer setiap tahunnya. Selain itu, latihan militer gabungan juga dilakukan dengan negara-negara

⁷⁵ Mark Stokreef, "A rising middle power facing a strategic dilemma", South Korea and East Asian Security, hal. 13

⁷⁶ Asan Report, South Korean Attitudes on the Korea-US Alliance and Northeast Asia

sekutu Amerika Serikat di wilayah Asia Timur lainnya. Pelatihan multinasional RED FLAG-Alaska diselenggarakan oleh angkatan udara AS di pangkalan udara Eielson di luar kota Fairbanks antara angkatan udara Jepang dan Angkatan udara Republik Korea pada 12-23 Agustus 2013. 4 pesawat tempur milik F-15 Korea Selatan yang dipakai adalah buatan AS.⁷⁷

Mengenai isu Hak kendali operasi masa perang, Hak kendali operasi masa perang merupakan hak mengendalikan operasi militer antara Korea Selatan dan AS, ketika perang terjadi di Semenanjung Korea. Hak ini sampai sekarang masih dipegang oleh AS. Hak kendali operasi ini terbagi dua, untuk masa biasa dan masa perang. Hak kendali operasi di masa biasa telah diserahkan dan dipegang militer Korea Selatan sejak tahun 1994. Sedangkan hak kendali operasi masa perang masing dipegang oleh militer AS. Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun, Korea Selatan dan AS telah menyepakati pengalihan hak kendali operasi masa perang dilakukan di tahun 2012. Namun, muncul kecemasan soal pertahanan akibat kasus penembakan Korut ke kapal militer Korea Selatan, Cheonan, di tahun 2010. Akhirnya, di masa pemerintahan Lee Myung Bak pengalihan hak kendali operasi masa perang ditunda hingga 1 Desember 2015. Kesepakatan itu diputuskan dalam pertemuan puncak negara kedua negara di tahun itu. Namun, di masa pemerintahan Park Geun Hye, Korea Selatan ingin memperpanjang lagi masa hak kendali operasi masa perang itu dan baru akan dialihkan

⁷⁷ Asia Pacific Defense Forum, *Kim ancam serangan nuklir; PBB keluaran sanksi*, 7 Maret 2013, (di
akses pada 10 Agustus 2014). Dapat diakses di <http://andforum.com/id/article/mian/articles/online/>

setelah memenuhi 22 syarat yang diperlukan untuk mengontrol kondisi pertahanan di Semenanjung Korea. Syarat terpenting dalam pengalihan itu adalah Korea Selatan harus benar-benar mampu menggunakan operasi perang terpadu untuk melawan Korea Utara. Artinya, jika Kill Chain dan sistem pertahanan anti-rudal Korea Selatan lengkap, hak kendali operasi masa perang barulah dapat dialihkan. Sistem Kill Chain adalah sistem pertahanan dengan mendeteksi fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara.⁷⁸ Korea Selatan dan AS memahami perlunya kemampuan tersebut karena menyakini keberadaan nuklir Korea Utara. Oleh sebab itu, pengalihan hak kendali operasi masa perang baru akan dilakukan saat militer Korea Selatan mampu melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Jika demikian, bagaimana sebetulnya kemampuan militer Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah menyatakan saat ini akan membentuk Kill Chain dan sistem pertahanan anti-rudal Korea Selatan (KAMD) yang merupakan sistem untuk mengetahui tanda-tanda serangan senjata nuklir dan rudal Korea Utara dan membalasnya. Pemasangan Kill Chain dan sistem pertahanan anti-rudal Korea Selatan direncanakan pada awal tahun 2020. Karena itu, diperkirakan waktu pengalihan hak kendali operasi masa perang pun ditetapkan sesuai dengan kondisi pemasangannya.⁷⁹ Untuk itu, selama pemasangan sistem pertahanan anti rudal

⁷⁸ KBS World Korea, *Korea Utara diperkirakan miliki teknologi pengalihan hulu ledak nuklir*, (diakses pada 8 Desember 2014); 12 Oktober 2013, dapat di akses di <http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea>

⁷⁹ KBS World Radio, *Isu hak kendali operasi masa perang (OPCON) dan sistem pertahanan anti-rudal balistik AS*, (di akses pada 9 Oktober 2014); 18 September 2014), dapat di akses di http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/

belum selesai dilakukan, Aliansi Korea Selatan dan Amerika akan diperkuat dan belum bisa diperlemah.

Di awal tahun 2014, terjadi kesepakatan adanya pembagian biaya dari Korea Selatan terhadap Amerika Serikat. Ini di kenal sebagai *Special Measures Agreement* (SMA). Hal ini terjadi akibat peningkatan ekonomi Korea Selatan dan banyaknya pasukan tentara yang berdomisili di Korea Selatan. Korea Selatan yang dulu dikenal sebagai negara penerima bantuan khususnya mendapat bantuan dari Amerika Serikat sekarang menjadi negara pemberi bantuan kepada Amerika Serikat. Dibawah SMA, Korea Selatan akan membantu Amerika Serikat untuk membiayai konstruksi, pekerja, pasukan militer dan lainnya yang berada di Korea Selatan. Untuk tahun 2014, Seoul menyediakan \$867 juta dollar Amerika untuk mendukung pasukan militer yang ditempatkan di Korea Selatan.⁸⁰

Aliansi militer di antara keduanya pun mendapatkan peningkatan dukungan dari masyarakat Korea dari tahun ke tahun. Di tahun 2010 ada sekitar 85% yang menganggap aliansi ini dibutuhkan, lalu meningkat menjadi 90 % di tahun 2014 dan akhirnya mendapat dukungan 93.3% di bulan Maret 2014.⁸¹

⁸⁰ Asan Report, *Op,Cit.*,

⁸¹ *Op,Cit.*

Gambar 3.3

Grafik dukungan masyarakat Korea Selatan terhadap Aliansi

Korea Selatan-Amerika Serikat

